



**RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025**



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);

sebagaimana... 4

8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 006);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 030);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025-2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode tahun 2025-2026.

7. Rencana...

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

18. Indikator..

18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- (2) RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (3) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (4) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Lampiran I : RENJA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Lampiran II : RENJA Dinas Kesehatan;
 - c. Lampiran III : RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Lampiran IV : RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Lampiran V : RENJA Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Lampiran VI..4

- f. Lampiran VI : RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Lampiran VII : RENJA Dinas Sosial;
- h. Lampiran VIII : RENJA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- i. Lampiran IX : RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : RENJA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Lampiran XI : RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
- l. Lampiran XII : RENJA Dinas Perhubungan;
- m. Lampiran XIII : RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian;
- n. Lampiran XIV : RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- o. Lampiran XV : RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
- p. Lampiran XVI : RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- q. Lampiran XVII : RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : RENJA Dinas Perikanan;
- s. Lampiran XIX : RENJA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- t. Lampiran XX : RENJA Dinas Peternakan;
- u. Lampiran XXI : RENJA Sekretariat Daerah;
- v. Lampiran XXII : RENJA Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;
- w. Lampiran XXII.1 : RENJA Bagian Hukum;
- x. Lampiran XXII.2 : RENJA Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan;
- y. Lampiran XXII.3 : RENJA Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- z. Lampiran XXII.4 : RENJA Bagian Organisasi;
- aa. Lampiran XXII.5 : RENJA Bagian Umum;
- bb. Lampiran XXII.6 : RENJA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
- cc. Lampiran XXIII : RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
- dd. Lampiran XXIV : RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- ee. Lampiran XXV : RENJA Badan Pendapatan Daerah;

ff. Lampiran XXVI...4

- ff. Lampiran XXVI : RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- gg. Lampiran XXVII : RENJA Inspektorat;
- hh. Lampiran XXVIII : RENJA Kecamatan Lobalain;
- ii. Lampiran XXIX : RENJA Kecamatan Rote Barat Laut;
- jj. Lampiran XXX : RENJA Kecamatan Rote Barat Daya;
- kk. Lampiran XXXI : RENJA Kecamatan Rote Barat;
- ll. Lampiran XXXII : RENJA Kecamatan Rote Selatan;
- mm. Lampiran XXXIII : RENJA Kecamatan Rote Tengah;
- nn. Lampiran XXXIV : RENJA Kecamatan Pantai Baru;
- oo. Lampiran XXXV : RENJA Kecamatan Rote Timur;
- pp. Lampiran XXXVI : RENJA Kecamatan Ndao Nuse;
- qq. Lampiran XXXVII : RENJA Kecamatan Landu Leko;
- rr. Lampiran XXXVIII : RENJA Kecamatan Loaholu; dan
- ss. Lampiran XXXIX : RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Penjabaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3:

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RENJA Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RENJA Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perubahan RENJA Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAKS SOMBU

Mengesahkan
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
ARISAN TETASU, SH
NIP. 19700214 200604 1 003

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah	T
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	N
Kepala Bagian Hukum	g

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



MONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki

Asisten Perekonomian dan Pembangunan	N
Kepala Bagian Hukum	g
Kepala Bapelitbangda	g

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 056

KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dan penyertaan-Nya, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rote Ndao mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hal ini Nampak bahwa sebagian besar yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan dan 76 (tujuh puluh enam) desa Pantai menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya ikan (Aquatik Resources).

Walaupun signifikannya peranan sektor Kelautan dan Perikanan bagi kehidupan masyarakat di daerah ini, pada sisi lain yang masih ditemui berbagai permasalahan yang mengusik kehidupan masyarakat khususnya petani dan nelayan. Hal tersebut terlihat pada sumber daya manusia yang terbatas, kemampuan dan ketrampilan baik di tingkat aparat pembina maupun petani dan nelayan masih terbatas serta sarana dan prasarana pun yang sangat terbatas, sering terjadinya illegal fishing, unregulation, unreported serta masalah kekurangan modal usaha yang berdampak pada belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam potensial yang ada.

Menyimak akan pentingnya peranan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sedangkan di sisi lain masih ditemui berbagai masalah sebagai faktor penghambat maka perlu dilakukan perencanaan yang taktis dan strategis sehingga secara bertahap baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dapat mengeliminir faktor-faktor penghambat yang dihadapi, agar pada suatu periode tertentu, peranan Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi unggulan di daerah ini.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman yang taktis dan strategis guna keberhasilan pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan ke depan.

Tuhan Memberkati!.

Ba'a 19 Juli 2024

Kepala Dinas Perikanan Kab. Rote Ndao



JUSUP B. MESSAKH, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19740310 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja PD.....	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
 III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB VPENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2024 serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023 dan substansi Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan pada periode waktu sebelumnya yang didasarkan pada berbagai perspektif kondisi dan perkembangan pembangunan strategis pro rakyat yang berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2025 didasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 - 2033;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
18. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pada Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini adalah :

1. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
2. Untuk dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan;
3. Untuk dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak lain dalam mengakses Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; serta
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, Misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD;
4. Lampiran tabel rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung di tujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
3. Tabel usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya serta
3. Rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao ini menyajikan gambaran umum dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023.

Jumlah pagu dana DPA-OPD Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian APBD sebesar Rp. 8.869.060.508,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 8.869.060.508 (Belanja Pegawai Rp. 1.376.643.558,-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.492.416.950,-, Belanja Hibah Rp. 0,-) dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,- yang dijabarkan dalam 4 program, 11 kegiatan, 17 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,88 % dapat dilihat pada tabel 1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Periode Pelaksanaan Tahun 2023.

Rencana fisik secara kumulatif dari 4 (Empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan sampai dengan kondisi triwulan IV Tahun 2023 mencapai Rp. 8.680.869.687,- atau sebesar 97,88%. Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran tidak ada.

B. Realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu:

- I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - 1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5 Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- II PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- 7 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- III PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
- 8 Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- 9 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - Penjamin Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- IV PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
- 10 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
- 11 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

I. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

1. Penyebab tidak tercapainya target karena kurangnya anggaran untuk penyediaan data statistik daerah;
2. Penyebab tercapainya target karena pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang ada.
3. Penyebab terlampauinya target karena memenuhi kebutuhan operasional dinas dan koordinasi pelaksanaan tugas.

J. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi–implikasi yang mampu mendorong kinerja Perangkat Daerah untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan profesional, diantaranya:

- a. Tersedianya informasi/data yang dalam penyusunan perencanaan pembangunan, contohnya: Data Statistik;
- b. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao;
- c. Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan monitoring Perencanaan Pembangunan daerah.

K. Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara matang dan terpadu;
- b. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan APBD;

- c. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD untuk mempedomani dokumen perubahan RPJMD yang dijabarkan ke dalam perubahan Renstra PD, sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menentukan program dan kegiatan di setiap OPD;
- d. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang tupoksi dilingkup Dinas Perikanan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKAN S/D TAHUN 2024 KABUPATEN ROTE NDAO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGE RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	REALISASI RENJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
			TARGET TAHUN 2021 + 2022 + 2023 + 2024	REALISASI 2021 + 2022	TARGET 2023	REALISASI TAHUN 2023	RUMUS	TARGET TAHUN 2024	RUMUS	RUMUS
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	102	102
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	38 Dok	19 Dok	19 Dok	19	100	19 Dok	38	100
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	12 Dok	12 Dok					12	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dok		12 Dok	12	100	12 Dok	24	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	7 Laporan	7 Dok					7	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan		7 Laporan	7	100	7 Laporan	14	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52 Org/Bln	20 Org/Bln	16 Org/Bln	16	100	16 Org/Bln	52	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	20 Org/Bln	20 Org/Bln					20	100
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org/Bln		16 Org/Bln	16	100	16 Org/Bln	32	100
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	10 Org/Bln	10 Org/Bln					10	100
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok		1 Dok	1	100	1 Dok	2	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dok	2 Org/Bln	1 Dok	1	100	1 Dok	2	100
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	2 Org/Bln	2 Org/Bln					2	100
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok		1 Dok	1	100	1 Dok	2	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	6 Org/Bln	6 Org/Bln					6	100
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	6 Org/Bln	6 Org/Bln					6	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	102	102
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	4 Unit					4	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	0 Paket		0 Paket	0	0	0 Paket	0	0
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2	100	2 Paket	4	100
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2	100	2 Paket	4	200

12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	9 Kali	9 Kali					9	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		2 Laporan	2	100	2 Laporan	4	100
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materi	200 Lembar	200 Lembar					200	100
		Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	12 Bulan	12 Bulan					12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2 Laporan		1 Laporan	1	100	1 Laporan	2	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	103	100
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	10 Unit	10 Unit					10	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	1 Unit					1	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5	100	7 Unit	12	240
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	28 Unit	28 Unit					28	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	16 Unit		1 Unit	1	100	16 Unit	17	106
17	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit					1	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	0 Unit		0 Unit	0	0	0 Unit	0	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan bina kelompok nelayan			0,47 %	0,35	74,47	0,49 %	0,84	100
		Meningkatnya produksi perikanan	35.905 Ton	5.327 Ton	22613 Ton	12614	55,78	13.292 Ton	31233	87
		Persentase pelaku perikanan tangkap yang terlatih								
		Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan								
8	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu)	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
19	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/Kota	Terlaksanya Pemberdayaan Nelayan Kecil	100 %						0	0
20	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Kapal Fiber Glass < 5 GT, mesin kapal inbord, pukat/gill net, jaring 3 lapis	539 Unit	539 Unit					539	100
		Jumlah prasarana perikanan tangkap yang tersedia	594 Unit		594 Unit	594	100			0
		Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	504 Org					504 Orang	504	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut dan Perikanan Budidaya Air Tawar	35378 Ton	- Ton					0	0
		Jumlah Produksi Perikanan Darat	49 Ton		50 Ton	13,80	27,60	15 Ton	29	59
		Persentase pelaku perikanan budidaya yang terlatih								
		Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan								
12	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya pembinaan ekonomi kelompok budidaya	10 Kelompok	5 Kelompok	5 kelompok	5	100	5 Kelompok	15	150
30	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis pembudidaya ikan yang baik dan berstandar	5 Kelompok	5 Klp					5	100
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh pendampingan yang baik kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	5 Kelompok		5 kelompok	5	100	5 Kelompok	10	200
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan ikan								
33	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana BBI	2 Pkt	2 Pkt					2	100
		Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2	100		2	100
		Penjamin Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18 Pkt	18 Pkt					18	100
		Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	86 Unit		86 Unit	86	100		86	100

[12]

IV	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya jumlah konsumsi ikan				55,64	Kg/Kpt	58,42	105	58,55	Kg/Kpt	0	0	
		Persentase sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan	30	%										
		Persentase pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terlatih												
15	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1	Dok	0	Dok	1	Dok	1	100	1	Dok	2	200
42	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1	Dok			1	Dok	1	100	1	Dok	2	200
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota												
	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya diversifikasi olahan makanan serba ikan, Tingkat konsumsi ikan, Pelaksanaan Lomba Inovasi Olahan Ikan												
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sarana pra sarana yang terdistribusi ke pedagang ikan	37	Unit	37	Unit						37	100	
		Jumlah Rehabilitasi Pasar Ikan	5	Unit			4	Unit	4	100	1	Unit	5	
			100	%	100	%	100	%	100	100	100	%	100	100

Faktor pendorong pencapaian kinerja : Dsiplin Kerja

Faktor penghambat : Proses capaian Kinerja dan anggaran harus sesuai dengan rencana anggaran kas

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

Hasil Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Dinas Perikanan mendapat Sumber Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung tugas dan fungsi pokoknya dengan rincian dapat dilihat pada tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun Anggaran 2023).

Pada tabel diatas dapat di jelaskan bahwa target kinerja pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan tahun lalu (tahun 2023) mencapai 97,88%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao masih terdapat banyak kesenjangan pelayanan ke masyarakat yang mana produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya yang belum mencapai target selama tahun n-2 dan tahun n-1. Faktor penghambatnya antara lain : Keterbatasan anggaran yang menyebabkan terbatasnya sarana pra sarana tangkap dan pembudidaya, keterbatasan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan potensi alam secara optimal dan berkelanjutan, penggunaan bibit rumput laut secara terus menerus sehingga menyebabkan rendahnya kualitas, faktor cuaca juga terkadang dapat mempengaruhi menurunnya produksi. Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao

No.	Indikator	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Persentase produksi perikanan Meningkat (%)		2,64	5,37	8,00	8,02	2,64	7,98	8,00	8,02	
1	Produksi Perikanan Laut (Ton)	√	21.759	13.292	14.710	15.890	12.614	13.621	14.710	15.890	
	Produksi perikanan Darat	√	40	15,00	19,00	22,00	13,80	18,40	19,00	22,00	
2	Tingkat Konsumsi Ikan (Ton)	√	55,64	58,55	64,26	67,19	58,42	59,51	64,26	67,19	

NO	Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan	Target IKK	Satuan	Target Renstra Dinas Perikanan Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Perikanan Tangkap	√	Ton	3.697	3.738	3.820	4124	2.921	2.642	2.685	2700	79,01	70,68	70,29	65,47
2	Produksi Budidaya Rumput Laut	√	Ton	16.000	17.439	17.939	18489	16.989	8.244	9.605	9914	106,18	47,27	53,54	53,62
3	Produksi perikanan budidaya air tawar	√	Ton	6	9	40	50	8,2	9,9	12,6	13,8	136,67	110,00	31,50	27,60
4	Konsumsi Ikan (kg/kpt)	√	Kg/kpt	50,7	51,19	53,5	55,64	50,7	51	53,5	58,42	100,00	99,63	100,00	105,00
5	Cakupan Bina kelompok nelayan	√	%	0,38	0,42	0,45	0,47	0,39	0,12	0,43	0,35	102,63	28,57	95,56	74,47

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dari target/sasaran yang ditetapkan sebesar 100% pada akhir tahun 2023 yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2023 berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan - aturan yang ada. Namun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao selama Tahun 2023 adalah:

1. Masih terdapat rendahnya produksi tangkap dan budidaya yang dipengaruhi sarana dan prasarana perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) yang kurang memadai;
2. Teknologi budidaya dan penangkapan yang masih sangat sederhana;
3. Rendahnya ketersediaan bibit ikan dan rumput laut;
4. Terbatasnya sarana prasarana rantai dingin dan rantai distribusi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 ini mengacu pada dokumen Rancangan RKPD Tahun 2025. Secara terperinci review terhadap rancangan awal RKPD 2025 dapat dilihat pada table 3.

Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Rote Ndao

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100%	1.650.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100%	1.650.000.000	
		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah		100%			Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah		100%		
		Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100%			Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100%		
		Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik					Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	19 Dokumen	40.000.000	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	19 Dokumen	40.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	12 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	12 Dokumen	35.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	7 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	7 Dokumen	5.000.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	1.355.823.047	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	1.355.823.047	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	16 Orang	1.271.109.047	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	16 Orang	1.271.109.047	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 Dok	84.714.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 Dok	84.714.000	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	4.200.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	4.200.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 Dok	4.200.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 Dok	4.200.000	

4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	123.310.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	123.310.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material kantor	Jumlah Bahan /material Kantor yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	2 Paket	19.118.000	Penyediaan Bahan / Material kantor	Jumlah Bahan /material Kantor yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	3 Paket	19.118.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	2 Paket	17.587.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	2 Paket	17587000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	2 Laporan	61.605.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	2 Laporan	61.605.000	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	47.387.150	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	47.387.150	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 laporan	47.387.150	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 laporan	47.387.150	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	79.279.803	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	100%	79.279.803	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	7 Unit	50.779.803	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	7 Unit	50.779.803	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	5 Unit	3.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	5 Unit	3.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	1 Unit	25.000.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pelaku perikanan tangkap yang terlatih Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan		5,59% 62,13%	2.460.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pelaku perikanan tangkap yang terlatih Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan		5,59% 62,13%	2.460.000.000	
1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/Kota	Terlaksanya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2.460.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/Kota	Terlaksanya Pemberdayaan Nelayan Kecil	11 Kecamatan (Semua Desa)	100%	2.460.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	504 Orang	2.460.000.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang tersedia	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	595 Orang	2.460.000.000	

	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan bantuan pembiayaan, kemitrausahaan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan bantuan pembiayaan, kemitrausahaan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pelaku perikanan budidaya yang terlatih Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan		0,87% 5,05%	2.510.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pelaku perikanan budidaya yang terlatih Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan		0,87% 5,05%	2.510.000.000	
1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pembudidayaan ikan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	217.500.000	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pembudidayaan ikan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	217.500.000	
	Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapatkan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 kelompok	30.000.000	Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapatkan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 kelompok	30.000.000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh pendampingan yang baik kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 kelompok	187.500.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh pendampingan yang baik kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 kelompok	187.500.000	
2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2.292.500.000	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2.292.500.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	30.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	30.000.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 unit	1.826.337.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 unit	1.826.337.000	
IV	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan Persentase pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terlatih		35% 35%	278.000.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan Persentase pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terlatih		30% 30%	278.000.000	
1	Penebitan Tanda Daftar Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	78.000.000	Penebitan Tanda Daftar Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Penebitan Tanda Daftar Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.800.000.000	

[19]											
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	78.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	78.000.000	
2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ton	100.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ton	200.000.000	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ton	100.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan angka konsumsi Ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ton	100.000.000	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Pelaku Usaha	100.000.000	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Pelaku Usaha	100.000.000	
			TOTAL		6.898.000.000					6.898.000.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao bersumber dari usulan Masyarakat baik melalui musrenbang maupun pokok pikiran dari anggota DPRD.

Penelahaan Usulan dan Program dapat dilihat pada table 4.

Tabel. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	4	3	5	6
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pelaku perikanan tangkap yang terlatih			
		Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan			
	1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/Kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/Kota			
	1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya			
	MUSRENBANG				
		Penyediaan Kapal Fiber Glas <5GT	Tualima	1 Unit	
		Penyediaan Kapal Fiber Glas <5GT	Ndao Nuse	1 Unit	
		Penyediaan Kapal Fiber Glas <5GT	Sedeeon	1 Unit	
		Penyediaan Kapal Fiber Glas <5GT	Tenalai	1 Unit	
		Penyediaan Kapal Fiber Glas <5GT	Oenggae	1 Unit	

		POKIR			
		Penyediaan mesin kapal diesel 10,5 HP	Ndao Nuse dan Anarae	3 Unit	
		Penyediaan mesin kapal diesel 10,5 HP	Kel. Namodale dan Desa Helebeik	3 Unit	
		Penyediaan pukat/gill net 2,1/2 Inch dan 3 Inch	Balaoli dan Tasilo	10 Piece	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pelaku perikanan budidaya yang terlatih			
		Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan			
	1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil			
	1. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapatkan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan	11 Kecamatan Semua Kel/Desa	5 Kelompok	
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh	11 Kecamatan Semua Kel/Desa	5 Kelompok	
	2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan ikan			
	1. Penjamin Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan Semua Kel/Desa	29 Unit	

		MUSRENBANG			
		Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Sanggaoen	1 Unit	
		Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Lekunik	1 Unit	
		Penyediaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Oelua	1 Paket	
		Penyediaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Tasilo	1 Paket	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan			
		Persentase pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terlatih			
	1. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
	1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Kecamatan Semua Kel/Desa	1 Ton	
	2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	11 Kecamatan Semua Kel/Desa	10 Pelaku Usaha	

Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Rote Ndao
Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capain Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			6.898.000.000				6.898.000.000
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	1.650.000.000			100 %	1.650.000.000
						Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100 %	
						Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				100 %	
						Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %				100 %	
3	25	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	40.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	19 Dokumen	40.000.000
3	25	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	35.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	35.000.000
3	25	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	7 Dokumen	5.000.000
3	25	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.355.823.047	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	1.355.823.047
3	25	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bln	1.271.109.047	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	16 Orang/Bln	1.271.109.047
3	25	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	84.714.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	84.714.000
3	25	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	4.200.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	4.200.000
3	25	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.200.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	4.200.000

3	25	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan umum perangkat daerah	100 %	123.310.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	123.310.000
3	25	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 paket	25.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 paket	25.000.000
3	25	01	2,06	04	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan /material Kantor yang Disediakan	2 paket	19.118.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2 paket	19.118.000
3	25	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	17.587.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2 Paket	17.587.000
3	25	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	61.605.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2 Laporan	61.605.000
3	25	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% %	47.387.150	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100% %	47.387.150
3	25	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.387.150	Dinas Perikanan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Laporan	47.387.150
3	25	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	13 Unit	79.279.803	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13 Unit	79.279.803
3	25	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	50.779.803	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	7 Unit	50.779.803
3	25	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	5 Unit	3.500.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5 Unit	3.500.000
3	25	01	2,09	07	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	1 Unit	25.000.000	(Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik,)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Unit	25.000.000

3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pelaku perikanan tangkap yang terlatih	5,59 %	2.460.000.000			6,07 %	2.460.000.000
						Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan	62,13 %				64,18 %	
3	25	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	100 %	2.460.000.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	100 %	2.460.000.000
3	25	03	2,02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	400 Orang	2.460.000.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	595 Orang	2.460.000.000
3	25	03	2,02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan bantuan pembiayaan, kemitrausahaan		-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pelaku perikanan budidaya yang terlatih	0,87 %	2.510.000.000			0,88 %	2.510.000.000
						Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan	5,05 %				5,10 %	
3	25	04	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil	100 %	217.500.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 %	217.500.000
3	25	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapatkan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan	5 kelompok	30.000.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5 kelompok	30.000.000
3	25	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memperoleh pendampingan yang baik kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	5 kelompok	187.500.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 kelompok	187.500.000

3	25	04	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan ikan	100 %	2.292.500.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	100 %	2.292.500.000
3	25	04	2,04	02	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30.000.000
3	25	04	2,04	0003	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	436.163.000	BBi Mokdale	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	1 Unit	436.163.000
3	25	04	2,04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29 Unit	1.826.337.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	29 Unit	1.826.337.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan	35 %	278.000.000			35 %	278.000.000
						Persentase pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terlatih	35 %				35 %	
3	25	06	2,01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	100 %	78.000.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 %	78.000.000
3	25	06	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1 Dokumen	78.000.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	78.000.000

3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			200.000.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		200.000.000
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		
3	25	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Keyersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	100.000.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 Ton	100.000.000
3	25	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	100.000.000	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	10 Pelaku Usaha	100.000.000
TOTAL								6.898.000.000				6.898.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao memiliki arti penting sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan, seluruh aparatur Dinas Perikanan secara berjenjang, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.
- c. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana tindak lanjut dengan ditetapkannya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran (PPAS) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

Ba'a, 19 Juli 2024

Kepala Dinas Perikanan Kab. Rote Ndao



JUSUP B. MESSAKH, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19740310 199803 1 008